

## **MENIMBANG PERAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA <sup>1)</sup>**

Drs. Sulton, M.Si. <sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Globalisasi dan perkembangan Ipteks memang berhasil menghadirkan sejumlah kemajuan, tetapi kehadirannya juga mendorong terjadinya perubahan di tengah masyarakat. Seperti lahirnya kebingungan serta dis-orientasi tata nilai dan norma di kalangan masyarakat termasuk generasi muda dan para remaja. Fenomena degradasi moral yang melanda seluruh kalangan dan lapisan masyarakat pada akhir-akhir ini, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sebagaimana dimaksud. Artikel ini membahas tentang pentingnya mengkritisi kembali penyelenggaraan pendidikan nasional mulai dari level kebijakan sampai implementasinya di sekolah, karena keberadaannya diasumsikan menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena dimaksud. Disinilah pentingnya political will, komitmen, dan program atau langka yang nyata dari segenap stakeholders pendidikan mulai dari para pengambil kebijakan pendidikan, pelaksana kebijakan pendidikan, pengelola pendidikan, guru, siswa, masyarakat dan orang tua.

**Kata Kunci:** pendidikan, karakter, PPKn

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Call for Paper, yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pada tanggal 7 Nopember 2015 dengan thema besar “*Inovasi Pembelajaran untuk Pendidikan Berkemajuan*”

<sup>2</sup> Dosen DPK Kopertis Wilayah VII Surabaya pada Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan Ipteks pada abad ke XXI, menjadi pilihan dan kesadaran kolektif bangsa-bangsa di dunia dalam menjawab problematika kehidupan masyarakatnya. Sebagai entitas kehidupan, globalisasi dan kemajuan Ipteks tidaklah *value free*, seperangkat nilai yang menyertainya termasuk nilai materialis-pragmatis telah mendorong terjadinya perubahan sosial yang cepat, mengempur seluruh sistem nilai dan pranata sosial yang selama ini menjadi pondasi bangunan peradaban masyarakat-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Bagaikan gelombang *tsunami*, nilai-nilai materialis-pragmatis itu meransempit cepat milibas bangunan sistem nilai, norma dan moral masyarakat pada seluruh aspek kehidupan sampai pada benteng terakhirnya bernama pendidikan berbasis nilai bahkan pendidikan agama. Hal ini ditandai dengan ketidak mampuan kedua program pendidikan tersebut dalam membentengi anak didik dengan watak dan karakter yang kuat mendasarkan pada nilai-nilai kebangsaan serta agama yang ada.

Kecenderungan itu bisa kita simak dari beredarnya informasi, berita, atau kasus yang termuat di media cetak, media elektronik, media sosial, serta realitas di sekitar kita, tentang fenomena degradasi moral yang sangat memprihatinkan. Kecenderungan itu diantaranya : Pertama, maraknya berbagai kasus pelanggaran hukum (mafia, kartel, korupsi, pembunuhan, perampokan, penculikan, dll) dan moral (KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan, dll) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (elite politik, penegak hukum, birokrat, agamawan, pendidik-akademisi, profesional, pengusaha, masyarakat umum, tetapi juga remaja dan anak-anak) di perkotaan sampai pelosok desa; Kedua, menggejalanya tindakan apatis, pemalas, penghasut, pencaci, pemaarah, pendendam, dan munculnya tindakan

anarchisme lainnya yang melibatkan berbagai komunitas di kota maupun pedesaan atas berbagai permasalahan individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Semuanya datang silih berganti, seakan mengubur memori kita akan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai diliputi nilai luhur, norma dan moral yang tinggi dari masyarakatnya.

Diantara deretan faktor yang turut mengkondisikan terjadinya berbagai kasus degradasi moral tersebut, penyelenggaraan pendidikan nasional ditunding turut menjadi penyebabnya, sehingga muncul pertanyaan mendasar ***bagaimana sebenarnya peran pendidikan nasional dalam meletakkan pondasi moral dan peradaban masyarakat ?*** Pertanyaan ini wajar mengemuka karena menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan nasional, pada dasarnya diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, yang ditunjukkan melalui kemampuannya dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berkepribadian dan berperilaku utama.

Sementara pada saat yang sama, virus materialis - pragmatis telah merasuki alam pikiran segenap stakeholders pendidikan nasional yang ada, mulai dari para elite politik, birokrat pemerintahan, para pengusaha, para kepala sekolah dan guru, masyarakat, orang tua dan anak-anak, sehingga pendidikan nasional berubah dari idealitasnya sebagai pembentuk watak dan peradaban bangsa menjadi “*perusahaan pendidikan*” dengan target-target produk politiknya yang pragmatis-simbolik pada setiap level bernama: *kelulusan 100%, NUN yang tinggi, prestasi akademik yang tinggi, banyaknya jumlah lulusan yang diterima di PTN dan lain sebagainya*. Segenap stakeholders seperti berada dalam pola pikir, kecenderungan, dan bergerak pada arah yang sama “*memaklumkan segala cara untuk*

*tercapainya target-target pragmatis-simbolis dimaksud*”. Akibatnya harapan akan lahirnya perilaku yang berkarakter dari penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi terabaikan dan semakin hilang dari pranata sosial-budaya masyarakat Indonesia.

### **MENIMBANG KEMBALI MISI PENDIDIKAN SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN KARAKTER**

Menurut Manulang dan Prayitno (2010: 65), inti dari pendidikan adalah belajar, tanpa belajar tidak ada aktifitas pendidikan. Prinsip belajar dibangun dari asumsi bahwa setiap anak memiliki potensi akal dan kecerdasan yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Dengan potensi akal dan kecerdasan itu seorang anak didik dapat berkembang dan menjadi individu yang aktif, kreatif dan dinamis dalam menghadapi lingkungan serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Karena itu Fuad Hasan (dalam Widiastono, 2004:55), memaknai pendidikan sebagai ikhtiar pembudayaan atas potensi anak didik tersebut demi kemajuan peradaban manusia. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*) tetapi juga pengalihan nilai-nilai budaya dan norma norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*).

Hal ini sejalan dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Selanjutnya ditegaskan, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini berarti penyelenggaraan pendidikan di sekolah haruslah menjadi proses transformasi yang terintegrasi antara kebutuhan akan penguasaan Ipteks, penanaman nilai, norma, dan moralitas untuk tercapainya kematangan, kedewasaan, kemandirian dan pembentukan jati diri peserta didik dengan watak-karakter tersebut.

Tugas berat ini, memang tidak dapat dibebankan sendiri pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, apalagi hanya dipercayakan kepada guru melalui interaksinya dengan siswa. Semua stakeholders pendidikan – politisi, birokrasi, kepala sekolah, komite sekolah, guru, masyarakat, orang tua, dan siswa – harus mengambil peran sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Semua stakeholders diharapkan berada dalam komitmen pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan aksi yang saling menopang untuk tercapainya tujuan pendidikan dimaksud. Artinya lebih dari sebatas harapan yang ditambatkan melalui pembelajaran dimana guru dan siswa berinteraksi, maka keputusan politik pendidikan, pelaksanaan kebijakan pendidikan, komitmen pengelola sekolah dan guru, dukungan komite dan orang tua, serta kesungguhan peserta didik menjadi penentu tercapainya tujuan pendidikan dimaksud.

Sekalipun demikian, penyelenggaraan pendidikan di sekolah tetap memegang peran yang penting dan strategis dalam proses pembentukan watak dan karakter peserta didik. Sekolah dipaksa oleh keadaan untuk mendesain seluruh

programnya, terutama pembelajaran yang ada secara berkelanjutan, agar tidak terperangkap dalam praktek *transfer knowledge* semata. Semua pembelajaran mata pelajaran – apalagi pembelajaran PKn dan pendidikan agama – disamping melakukan transformasi pengetahuan sesuai *basic science* masing-masing, juga harus didorong untuk melakukan transformasi *moral knowing*, *moral awareness*, dan *moral behavior* dari peserta didik (lihat konsep Lickona, 1992). Meski dalam realitasnya, praktek pendidikan (baca: pembelajaran) di Indonesia, masih cenderung mengedepankan penguasaan aspek kognisi (pengetahuan-keilmuan) dan kurang memperhatikan bahkan mengabaikan misi idealnya dalam membentuk watak dan karakter peserta didik.

Praktek penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, seperti jauh panggang dari api, jauh antara *das sein* dengan *das sollen*-nya, karena segenap stakeholders sekolah terperangkap dalam cara berpikir dan bertindak instan, formalis, dan simbolis. Praktek pendidikan dan pembelajaran yang demikian ini, kemudian mudah sekali memicu terjadi pelanggaran berjamaah di sekolah (kepala sekolah, panitia ujian, pengawas ujian dan guru) mulai dari praktek manipulasi nilai ujian sekolah, membentuk tim dari siswa untuk sukses UN, mengkondisikan pengawas sampai pada praktek membocorkan jawaban soal UN. Sementara pada level peserta didik berkembang pula penyimpangan berupa: praktek jual-beli jawaban UN, mencontek saat UN, perjokian ujian, dan plagiarisme.

Fenomena sosio-psikologis tersebut semakin mematangkan keadaan dan memicu munculnya gejala negatif lain yang mereduksi misi ideal pendidikan/pembelajaran, seperti: sikap pemalas dan apatis dalam belajar, mengabaikan proses, berpikir copy-paste, mudah mengabaikan nilai-norma-moral, egois dan a-sosial, sampai gejala tawuran antar-

pelajar dan berbagai kasus lain yang mencoreng dunia pendidikan. Apa yang sedang terjadi, baik yang menyangkut pergeseran nilai-nilai, norma, pandangan hidup, perubahan sikap dan tata krama mereka adalah fenomena yang mencemaskan sekaligus merupakan “*warning*” bagi sekolah.

Sebagai bagian dari pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan watak dan karakter anak bangsa, suka tidak suka sekolah harus mengambil peran untuk ikut memecahkan dilema tersebut. Karena akibat terburuk akan menimpah suatu bangsa, jika generasi mudanya kehilangan orientasi dan semangat juang. Dalam kaitan ini Rogers (2002) mengingatkan bahwa generasi muda di hampir semua negara sedang mengalami disorientasi, kehilangan arah dan pegangan sebagaimana dimaksud. Dan fenomena ini, jelas sangat mengkhawatirkan kelangsungan dan perkembangan suatu bangsa termasuk Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut, seringkali sekolah dan warganya menyikapinya secara datar dan wajar sebagai konsekuensi logis dari pergeseran zaman, yang seringkali dibarengi dengan munculnya “*new morality*” (Sunarti, 2001). *New morality* adalah suatu standar moral yang diadopsi secara membabi buta dari barat, yang kemudian merebak luas karena globalisasi dan dukungan arus informasi yang pesat. Proses pergeseran nilai, norma, dan sikap generasi muda memang tidak berada dalam ruang kosong yang terpisah, tetapi dalam suatu sistem yang dinamis. Misalnya fenomena munculnya kenakalan remaja, sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, akan tetapi karena adanya konflik nilai, sikap kekecewaan dan kegelisahan mereka atas banyak hal.

Inilah tantangan terbesar pendidikan dan pembelajaran di sekolah serta pentingnya menimbang kembali peran sekolah dalam menyiapkan generasi anak bangsa yang

matang, dewasa, mandiri, berkarakter, dan memiliki jati diri yang kuat. Dengan demikian, pendidikan dan pembelajaran di sekolah, seharusnya bukan hanya ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan penguasaan Ipteks fisik belaka tetapi juga anak yang memiliki kelembutan perilaku, sikap arif dan bijaksana (Sanusi 2004).

### **PROGRAM SEKOLAH DAN MISI PENDIDIKAN NILAI**

Pendidikan dan pembelajaran di sekolah akhirnya menjadi salah satu tumpuan utama dalam proses pembentukan karakter siswa dan wahana penyemaian embrio pranata sosial untuk peradaban masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua menaruh harapan besar atas praktek pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang dapat melahirkan generasi yang pintar, cerdas, berwatak, berkarakter dan memiliki jati diri yang kuat. Dalam kaitan ini John Locke dengan teori tabularasanya mengingatkan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya harapan tersebut, karena pembentukan watak dan karakter peserta didik adalah proses yang terus menerus, yang dapat menembus batasan ruang, waktu, tempat, kondisi, bahkan sumber.

Asumsinya bahwa setiap anak sebenarnya lahir dalam fitrah dan suci. Anak akan tumbuh menjadi pribadi berkarakter dan memiliki jati diri yang kuat, jika lingkungannya berkarakter dan berjati diri pula. Karena itu tempat dimana anak-anak tinggal dan menghabiskan waktunya – yaitu di rumah, di sekolah dan di masyarakat – haruslah menjadi lingkungan yang berkarakter dan berjati diri. Disinilah tiga pusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai lahan subur bagi penyemaian dan

tumbuhnya karakter serta jati diri peserta didik sebagaimana dimaksud.

Kebutuhan untuk mengkonstruksi lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi sangat strategis dan sekolah – terutama dengan kekuatan visi dan komitmen kepala sekolah – diharapkan mampu menjadi konduktor, untuk memimpin orkestra kegiatan ketiga lingkungan pendidikan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan karakter dan jati diri siswa tersebut, baik pada proses *moral knowing*, *moral awarness*, maupun *moral behavior* (diadopsi dengan perbaikan dari konsepnya Lickona, 1992). Ini berarti harus ada intervensi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif pada ketiga pusat pendidikan, sehingga memungkinkan anak didik dapat menguasai *basic science* sekaligus melakukan penguatan atau penguasaan pengetahuan moral, kesadaran moral dan bersikap/ tingkah laku moral dalam kerangka pembentukan karakter dan jati dirinya.

Pengkondisian lingkungan sekolah dalam hal ini berarti menyiapkan lingkungan yang memungkinkan pendidikan nilai dilaksanakan yaitu bagaimana suatu nilai dan norma yang dipercaya dan kemudian diimplementasikan kedalam seluruh aspek kehidupan di sekolah (Hawkes, 2003). Dan untuk memperoleh hasilnya secara nyata, pendidikan nilai harus dirancang sebagai sebuah proyek sekolah, terintegrasi dalam setiap aspek kurikulum, kependidikan dan aktivitas belajar mengajar, melibatkan seluruh staf pengajar atau guru, organisasi/yayasan sekolah dan para pembuat kebijakan yang bekerja bahu membahu sebagai sebuah tim (Combes, 2003).

Karena itulah sekolah harus merancang atau mendesain program/kegiatan baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra-kurikuler, lebih dari sekedar untuk penguasaan *basic science* atau *core value* masing-masing program tetapi juga misi

pendidikan nilai dalam bentuk penguatan pengetahuan moral, kesadaran moral, dan sikap/perilaku moral sesuai standar nilai dan norma yang berlaku kedalam seluruh rangkaian atau tahapan program yang ada. Misalnya dalam kasus pembelajaran, untuk terlaksananya misi ideal pendidikan nilai harus dirumuskan program/kegiatan yang relevan sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pada *refleksi*, sehingga memungkinkan siswa mencapai prestasi akademiknya sekaligus melakukan transformasi nilai dan norma yang ditetapkan. Inilah urgensi implementasi kurikulum 2013 dengan paradigma karakternya berikut penyesuaian standar-standar yang menyertainya.

Disinilah sekali lagi, pentingnya sekolah mengambil inisiasi untuk mendesain program dan kegiatannya baik yang formal maupun informal, yang secara terintegrasi mampu mendorong terbentuknya kecerdasan, watak, dan karakter anak sesuai dengan standar nilai-norma-moral, sekaligus mengajak orang tua dan stakeholders masyarakat lainnya berperan aktif sesuai kondisi lingkungan masing-masing. Logika tersebut sekaligus menegaskan, pentingnya stakeholders sekolah seperti orang tua dan masyarakat untuk memahami visi, misi, tujuan diselenggarakannya pendidikan dan pembelajaran, sehingga dapat dilakukan program/kegiatan yang saling menguatkan untuk terbentuknya karakter dan jati diri siswa.

#### **PENGUATAN PEMBELAJARAN SEBAGAI PROSES PENDIDIKAN NILAI**

Memperkuat pembelajaran sebagai proses pendidikan nilai sama artinya dengan : *Pertama*, menjadikan seluruh rangkaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi sebagai proyek transformasi nilai-norma dengan

melibatkan guru, siswa, warga sekolah, orang tua, bahkan lingkungan sekitar sekolah. *Kedua*, melihat kembali kurikulum dan memikirkan bagaimana penekanan nilai dapat dilakukan dalam berbagai materi pembelajaran yang berbeda. Prosesnya tidak pada bagaimana menanamkan nilai kepada para siswa, namun lebih kepada proses menggali atau mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai yang memang sudah ada dan atau diwariskan pada masing-masing individu siswa tersebut. *Ketiga*, persoalan yang sering terjadi adalah keterbatasan alokasi waktu untuk menyelipkan pengajaran nilai. Sehingga muncul kecenderungan untuk menjadikan nilai sebagai subyek khusus atau sekolah mengalokasikan waktu tertentu untuk membahas masalah nilai. Yang perlu diingat, pengajaran nilai dengan cara tersebut biasanya kurang efektif, jika dalam prosesnya tidak disertai dengan penciptaan lingkungan belajar berbasis nilai.

Pada taraf tertentu, ketrampilan dan teknik mengajar yang dapat mendukung pembentukan lingkungan belajar berbasis nilai amatlah penting, sehingga training, pelatihan dan berbagai kegiatan pengembangan yang mendukung pendidik amatlah dibutuhkan. Kesadaran pendidik terhadap nilai-nilai dan norma yang mereka yakini akan menunjang para guru untuk membawanya lebih lanjut ke ruang kelas, sehingga suasana penuh nilai akan lebih terbangun, daripada hanya sekedar memberlakukan aturan yang ketat dan kaku, yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. "*Ide keseluruhan dari pendidikan berbasis nilai adalah guru pertama-tama melihat ke dalam diri mereka sendiri terlebih dahulu.*" (Combes, 2003) atau memulai proses "*pemahaman diri dengan melakukan penelusuran ke dalam diri lewat pengetahuan, perenungan dan sikap kritis terhadap diri sendiri.*" (Delors, 2007).



Pelajaran tentang nilai secara mudah dapat diintegrasikan dalam berbagai setting belajar. Kerap kali diskusi tentang subyek atau materi pelajaran yang tengah dipelajari di kelas mengarah pada diskusi tentang nilai. Pelajaran tentang nilai dapat pula diselipkan ketika terjadi konflik antar siswa. Situasi-situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi nilai-nilai lebih lanjut. Intinya menciptakan suasana berbasis nilai dalam proses belajar mengajar amatlah penting untuk eksplorasi optimal dan pengembangan nilai-nilai oleh anak-anak dan generasi muda. Sebuah suasana belajar berlandaskan pemahaman, kepercayaan, kepedulian dan saling menghargai, secara natural akan meningkatkan atensi, motivasi, kreativitas, dan pengembangan afeksi serta kognitif para siswa.

Itulah sebabnya, penting diperhatikan oleh guru diluar target akademik pelajaran, akan pentingnya menciptakan situasi dan kondisi untuk proses penguatan *moral knowing*, *moral awarness*, dan *moral behavior* dimaksud. *Moral knowing*, yaitu suatu proses yang memungkinkan siswa menjadi tau, mengerti, faham, dapat membedakan, membandingkan, dan menilai sikap atau tindakan yang sesuai dengan nilai-norma-moral yang berlaku dan sebaliknya. *Moral awarness*, yaitu suatu proses yang memungkinkan anak didik tumbuh dalam kecenderungan, prioritas, keyakinan, kesadaran, dan komitmennya atas tindakan yang sesuai dengan nilai-norma-moral yang berlaku serta membenci yang sebaliknya. *Moral behavior*, yaitu suatu proses kegiatan yang memungkinkan anak didik dapat melakukan dan terbiasa melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-norma-moral yang berlaku serta menjauhi atau meninggalkan tindakan yang sebaliknya.

### **PENGUATAN PEMBELAJARAN PKN SEBAGAI NATION CHARACTER BUILDING**

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yaitu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri siswa yang beragam – dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa – untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari diselenggarakannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pengertian demikian, Pendidikan Kewarga-negaraan merupakan salah satu subyek pembelajaran yang mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor “*value-based education*”. Artinya Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai sarana *nation character building* (Sapriya, 2005: 4), yaitu proses pembentukan karakter individu siswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas atau *smart and good citizen* (Cogan and Derricot, 1998: 2). Dalam kaitan ini ada tiga paradigma yang mendasari penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sistem pembelajaran, yaitu: *Pertama*, secara kurikuler merupakan subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*,

secara teoretik merupakan subjek pembelajaran yang memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, secara programatik merupakan subjek pembelajaran yang menekankan pada isi dengan mengungkap nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam ber-masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (lihat Winataputra dan Budimansyah, 2007).

Sebagai sistem pembelajaran dalam kerangka *nation character building*, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membentuk *civic competences*, yaitu pesengetahuan, nilai dan sikap, serta ketrampilan kewarganegaraan yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Meminjam konsepnya Branson (1998:16), pembentukan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) diformulasikan ke dalam penguatan tiga komponen, yaitu: *Pertama*, *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Kedua*, *civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan peran serta warga yang relevan; *Ketiga*, *civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Disinilah pentingnya penguatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan multi strategi dan metode yang

memungkinkan terbentuknya *civic competences* dimaksud.

### **MENIMBANG KEMBALI STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Djahiri (dalam Suwardi, 2009:53) menyatakan bahwa proses pembelajaran PKn merupakan proses kegiatan pembelajaran yang direkayasa sedemikian rupa berdasarkan komponen pembelajaran seperti : guru, materi, metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran PKn dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara guru dengan siswa dalam mengoperasi-onalisasikan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin keberhasilan tercapainya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk *civic competences* tersebut, maka diperlukan strategi pembelajaran dan metode untuk merealisasi strategi yang telah ditetapkan. Jika strategi dimaknai sebagai “*a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal*” (J.R. David, 1976), atau suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien (Kemp, 1995), maka strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perencanaan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Penerapan strategi pembelajaran pada hakekatnya adalah prosedur sistematis dalam pembelajaran yang menggambarkan bagaimana guru mengembangkan interaksinya dengan siswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mengoperasionalisasikan materi, sumber, metode, media dan evaluasi pembelajaran.



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan paradigma pendidikan menuntut guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan profesional dalam memilih strategi pembelajaran dan merancanginya secara lebih efektif dalam mencapai tujuan. Meskipun realitasnya masih banyak guru – termasuk para guru PKn – yang berpikir konservatif, dengan memandang pembelajaran sebatas sebagai perolehan pengetahuan siswa *an sich*, sehingga pilihan strategi pembelajarannya terpaku pada upaya perolehan pengetahuan siswa. Akibatnya pembelajaran selalu didominasi oleh guru dengan pilihan metode yang relevan seperti ceramah dan tanya jawab.

Masalah sebenarnya bukan terletak pada boleh dan tidak boleh memilih strategi dan menggunakan metode tertentu termasuk didalamnya ceramah dan tanya jawab untuk suatu pembelajaran, tetapi lebih pada relevansi pilihan strategi atau model dan penggunaan metode dengan tujuan dan kondisi interaksi guru dan siswa tertentu dalam pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan dengan misinya sebagai pembelajaran nilai terutama dalam membentuk *civic competences*, tentu menuntut pilihan dan pengembangan strategi pembelajaran serta penggunaan metode yang relevan dengan tujuan dimaksud. Salah satu sebab kegagalan pembelajaran berbasis nilai, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada pilihan strategi atau model pembelajaran dan penggunaan metode yang relevan serta efektif dalam pembentukan *civic competences*.

Berikut beberapa pilihan strategi atau model pembelajaran berbasis nilai yang dapat dipertimbangkan penggunaannya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (lihat Chotimah, 2012), yaitu :

#### a. Portfolio Based Model

Menurut Eric Digest (2000), *"Portfolios are used in various professions together typical..; art students assamble a portfolio for an art class"*. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa, yang bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan, juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins, 1994 : 20). Melalui model pembelajaran portofolio, selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap tanggung jawab.

#### b. Consideration Model

Model consideration menegaskan bahwa pembentukan moral yang berkaitan dengan kepribadian tidaklah sama dengan pengembangan kognitif-intelektual yang bersifat rasional. Model ini mengajak siswa untuk mengandaikan dirinya dalam suatu masalah konflik di kehidupan sehari-hari. Siswa diminta menganalisis situasi baik yang tampak di permukaan atau yang tersirat seperti perasaan, kebutuhan dan kepentingan yang ada didalamnya. Minta siswa memberikan tanggapan tertulis sesuai dengan perasaan. Ajak siswa menganalisis respon siswa lainnya dan membuat kategorisasi dari respon tersebut. Dorong siswa untuk menakar akibat yang timbul dari setiap tindakan yang diusulkan. Ajaklah siswa untuk menganalisa permasalahan secara multidisipliner. Dorong siswa merumuskan sendiri rencana tindakan sesuai pertimbangannya sendiri.

**c. Values Clarification Techniques (VCT)**

Model *Values Clarification Techniques (VCT)* atau disebut juga sebagai teknik mengklarifikasi nilai, mengungkap nilai, atau membina nilai adalah salah satu model pembelajaran afektif yang digunakan untuk membina siswa agar mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, menilai dan mengambil keputusan, nilai mana yang akan dipilihnya secara nalar dan penuh keyakinan. Dengan demikian VCT sebenarnya model pembelajaran nilai yang bertujuan untuk menata situasi agar siswa mendapat nilai-nilai mereka sendiri dengan cara terlibat dalam memilih, menghargai dan berbuat dalam suatu tindakan dan keputusannya sendiri. Karena itu model ini banyak dikembangkan untuk kepentingan program pembelajaran kawasan afektif pada umumnya dan Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya.

Model ini mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah atau fakta. Berdasar masalah dan fakta tersebut, siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan baik secara perorangan atau kelompok lengkap dengan argumentasinya. Setiap tanggapan dan argumentasi yang disampaikan oleh siswa akan dikaji akibat dan kemungkinan tindak lanjutnya. Selanjutnya siswa baik secara perorangan atau kelompok diajak menyimpulkan tindakan tersebut dalam arahan guru sesuai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kesimpulan tersebut kemudian dijadikan dasar tindak lanjut pembelajaran seperti: program remedial, pengayaan, uji coba, atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

**d. Cognitive Developmental Model**

Model ini berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dari model ini ada dua hal yang utama, yaitu :

- 1) membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi.
- 2) mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985). Manfaatnya adalah mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral.

**e. Behavioral Systems Model**

Model pembelajaran ini dikenal sebagai model modifikasi perilaku dalam hubungannya dengan respon terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kegiatan belajar berorientasi pada perubahan perilaku yang tadinya tidak bisa menjadi bisa atau tidak tahu menjadi tahu, dan sebagainya. Model pembelajaran banyak diterapkan dalam mata pelajaran praktik. Metode pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok model sistem perilaku ini antara lain: metode belajar tuntas (*mastery learning*), CBT (*competence based training*), pembelajaran langsung (*direct instruction*), drill, dan sebagainya. Dalam penerapan model sistem perilaku, guru dapat menggunakan metode tutorial dengan membimbing siswa sampai mencapai tujuan

**PENUTUP**

Globalisasi dan perkembangan Ipteks memang berhasil menghadirkan sejumlah kemajuan, tetapi kehadirannya juga mendorong terjadinya perubahan di tengah masyarakat. Perubahan sosial yang cepat, tanpa penopang sistem nilai dan pranata sosial yang kuat, ternyata dapat melahirkan kebingungan serta dis-orientasi tata nilai dan norma di kalangan masyarakat termasuk generasi muda dan para remaja. Fenomena degradasi moral yang melanda seluruh kalangan dan lapisan masyarakat pada akhir-

akhir ini, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sebagaimana dimaksud.

Merespon fenomena tersebut, sangat strategis mengkritisi kembali penyelenggaraan pendidikan nasional mulai dari level kebijakan sampai implementasinya di sekolah, karena keberadaannya diasumsikan menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena dimaksud. Disinilah pentingnya *political will*, *komitmen*, dan *program atau langkah yang nyata* dari segenap stakeholders pendidikan mulai dari para pengambil kebijakan pendidikan, pelaksana kebijakan pendidikan, pengelola pendidikan, guru, siswa, masyarakat dan orang tua untuk terselenggaranya pendidikan atau pembelajaran yang lebih terintegratif, yaitu proses pembelajaran yang didesain sebagai proses transformasi knowledge sekaligus juga proses transformasi nilai-norma-moral untuk kematangan dan pendewasaan anak didik.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan misinya sebagai wahana pendidikan nilai dan pembentuk karakter siswa, termasuk didalamnya penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan harus diupayakan dan didesain secara berkelanjutan dalam kerangka pelaksanaan misi dimaksud. Sekolah harus mendesain ulang berbagai program/kegiatan pendidikan di sekolah sebagai media pembentukan watak serta karakter anak didik. Sementara itu pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, harus diselenggarakan lebih dari sebatas menambah atau memperkuat perolehan pengetahuan siswa dengan berbagai simbol-simbol akademiknya, tetapi juga menjadi wahana proses transformasi nilai, norma, dan moral yang diperlukan dalam pembentukan watak, karakter, dan pendewasaan anak didik. Apalagi untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan tujuannya untuk membentuk *civic competences* anak didik, maka pembelajaran yang ada harus didesain dengan memilih dan menggunakan strategi

yang relevan serta efektif untuk pencapaian kompetensi dimaksud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Chotimah, Umi., 2012, *Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation Dalam Civic Responsibility*, Palembang: Ps PKn FKIP Universitas Sriwijaya
- Combes, Bernard., 2003., *Global Perspectives on Values Education*. Disampaikan pada Simposium bertajuk *Giving Value to Values Education*, Hong Kong, Oktober 2003
- Delors, Jacques, et al. (1996). *Learning: The Treasure Within*, Laporan Komisi Internasional Pendidikan Abad 21 kepada UNESCO, UNESCO Publishing, ISBN 0-7306-9037-7.
- Djahiri, Kosasih. 2006., *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
- Hawkes, Neil (2003). *How to Inspire and Develop Positive Values in Your Classroom*. Diterbitkan oleh LDA, ISBN 1-85503-371-2.
- Lickona, Thomas., 1992., *Education for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York : Bantam Books
- Manulang, Belferik., dan Prayitno, 2010., *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Medan : Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

- Rogers, Carl, (2002). *Freedom to Learn*.  
Columbus : Bell & Howell  
Company.
- Sanusi, Achmad. 2004. *Kapita Selekta  
Pembahasan Masalah-Masalah  
Sosial*. Bandung : Fakultas Pasca  
Sarjana IKIP Bandung
- Sapriya. 2005. *Perspektif Pakar terhadap  
Pendidikan Kewarganegaraan  
sebagai Wahana Pembangunan  
Karakter Bangsa (Disertasi)*.  
Bandung : Sekolah Pascasarja UPI.
- Sunarti, B., (2001). *New Morality*. Surakarta :  
FIP Universitas Sebelas Maret.
- Widiastono, Tonny (ed)., 2004, *Pendidikan  
Manusia Indonesia*. Jakarta :  
Penerbit Buku Kompas
- Winataputra dan Budimansyah 2007. *Civic  
Education: Konteks, Landasan,  
Bahan Ajar dan Kultur Kelas*.  
Bandung : Program Studi  
Pendidikan Kewarganegaraan SPs  
UPI.